



KEMENAG



**Kemenag
Berdampak**



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Paser**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER**

**Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot
Kabupaten Paser**



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
NOMOR 484 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, penetapan kinerja, penganggaran, pengukuran kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser tahun 2025-2029.

Mengingat : a. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

h. Peraturan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029;

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Pada Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029; dan

j. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor 483 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Paser Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai:
1. Dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Dasar penyusunan Perjanjian Kinerja;
 3. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 4. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 5. Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);; dan
 6. bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP.
- KETIGA : Seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser wajib:
1. Menjabarkan IKU ke dalam indikator kinerja turunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing;;
 2. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala; dan
 3. menyampaikan laporan capaian kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal 22 Desember 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER NOMOR 484 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER TAHUN 2025 – 2029

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
1	Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	1. Dialog/Diskusi dengan tokoh agama dan pihak terkait 2. Monev KUA yang menyelenggarakan EWS	1. Dokumen rencana dan laporan pelaksanaan EWS (Surat Tugas, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi, Laporan KUA). 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi (Form Monev terstandar dan Berita Acara Verifikasi). 3. Rekapitulasi data keaktifan KUA dalam pelaksanaan EWS yang telah diverifikasi Seksi Bimas Islam.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan EWS b = Jumlah total KUA	Kasi Bimas Islam
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam	Persentase peningkatan audiens MTQ	Event MTQ	1. Daftar hadir/rekapitulasi jumlah audiens MTQ. 2. Laporan pelaksanaan kegiatan MTQ. 3. Dokumentasi kegiatan (foto/video). 4. Berita Acara dan rekapitulasi verifikasi jumlah audiens oleh panitia/penanggung jawab kegiatan.	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ a. Jumlah audiens tahun ini b. Jumlah audiens tahun lalu	Kasi Bimas Islam
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	Event seni budaya agama Islam	1. Daftar peserta terdaftar dan hadir. 2. Laporan resmi pelaksanaan event seni budaya. 3. Rekapitulasi jumlah peserta yang diverifikasi panitia. 4. Dokumentasi kegiatan.	$((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah peserta event tahun ini b = Jumlah peserta event tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	1. Surat tugas/penetapan kegiatan pembinaan. 2. Daftar hadir lembaga binaan. 3. Laporan hasil pembinaan/pendampingan. 4. Instrumen monitoring dan evaluasi pembinaan. 5. Rekapitulasi lembaga yang telah diverifikasi menerima pembinaan.	(a/b) X 100 % a. jumlah lembaga yang telah menerima pembinaan b. jumlah total lembaga	Kasi Bimas Islam
3	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog kerukunan agama Islam	1. Surat tugas/penetapan kegiatan dialog. 2. Undangan dan daftar hadir peserta dialog. 3. Notulen/berita acara hasil dialog dan rekomendasi EWS. 4. Dokumentasi kegiatan (foto/video). 5. Rekapitulasi jumlah dialog yang diverifikasi oleh Seksi Bimas Islam.	$((a - b)/b) \times 100\%$ a = Jumlah dialog kerukunan tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	Pendampingan atau pembinaan tata kelola lembaga agama dan sosial keagamaan	1. Surat tugas/penetapan kegiatan pembinaan. 2. Daftar hadir lembaga binaan. 3. Laporan hasil pembinaan/pendampingan. 4. Instrumen monitoring dan evaluasi pembinaan. 5. Rekapitulasi lembaga yang telah diverifikasi menerima pembinaan.	(a/b) X 100 % a. jumlah lembaga yang telah menerima pembinaan b. jumlah total lembaga	Kasi Bimas Islam dan Kasubbag TU (Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam	Bimbingan perkawinan calon pengantin agama Islam	1. Daftar hadir peserta Bimwin. 2. Sertifikat/surat keterangan mengikuti Bimwin. 3. Laporan pelaksanaan Bimwin KUA. 4. Data pendaftaran nikah (SIMKAH).	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan b = Jumlah total calon pengantin yang mendaftar nikah pada tahun berjalan	Kasi Bimas Islam
		Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Bimbingan pra nikah remaja usia sekolah	1. Daftar hadir peserta BRUS. 2. Sertifikat BRUS yang diterbitkan. 3. Laporan kegiatan dan dokumentasi. 4. Data jumlah remaja usia 15–19 tahun (BPS).	$(a/b) \times 100\%$ a. Remaja usia 15–19 tahun yang memperoleh sertifikat BRUS b. jumlah total remaja usia 15–19 tahun menurut BPS	Kasi Bimas Islam
		Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	1. Surat tugas pembinaan. 2. Daftar hadir peserta binaan. 3. Laporan hasil pembinaan keluarga sakinah. 4. Dokumentasi kegiatan.	$(a/b) \times 100\%$ a. jumlah layanan bimbingan keluarga tahun berjalan b. jumlah layanan bimbingan keluarga tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam
		Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Pendataan sarana dan prasarana KUA	1. Instrumen checklist standar sarpras KUA. 2. Berita Acara hasil penilaian. 3. Dokumentasi sarpras. 4. Rekapitulasi hasil verifikasi.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana b = Jumlah total KUA yang dinilai	Kasi Bimas Islam
		Presentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	Pendataan jumlah peristiwa nikah	1. Data peristiwa nikah pada SIMKAH. 2. Rekapitulasi laporan bulanan KUA. 3. Berita Acara rekapitulasi tahunan.	$((a - b)/b) \times 100\%$ a = Jumlah peristiwa nikah tahun berjalan b = Jumlah peristiwa nikah tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	1. Pembinaan Penghulu 2. Uji kompetensi Penghulu	1. Surat keputusan/sertifikat kompetensi penghulu. 2. Daftar penghulu PNS aktif. 3. Laporan pelaksanaan pembinaan dan uji kompetensi. 4. Data kepegawaian (SIMPEG).	$(a/b) \times 100\%$ a : Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi kenaikan jenjang b : Jumlah penghulu PNS	Kasi Bimas Islam
5	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam	Survey terhadap sasaran penyuluhan	1. Instrumen survei kepuasan layanan terstandar (kuesioner). 2. Rekapitulasi hasil survei (nilai persepsi dan ekspektasi). 3. Berita acara pengolahan dan validasi data survei. 4. Laporan analisis hasil survei.	Survey (Gap antara ekspektasi dan persepsi pelayanan yang diterima)	Kasi Bimas Islam
		Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	1. Pembinaan Penyusunan Portofolio Penyuluh Agama Islam 2. Pembinaan dan Seleksi Penyuluh Agama Islam Award 3. Pembinaan Kepenyuluhan	1. Instrumen penilaian kinerja penyuluh (format evaluasi terstandar). 2. Portofolio penyuluh (laporan harian, konten digital, sertifikat diklat). 3. Rekapitulasi hasil penilaian kinerja tahunan. 4. Data penyuluh aktif (SIMPEG/Database Penyuluh).	$(a/b) \times 100\%$ a = jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja berkategori baik b = jumlah total penyuluh agama	Kasi Bimas Islam
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam	1. Rapat Kerja IPARI 2. CAT Penais	1. Data kelompok sasaran binaan (daftar kelompok/majelis binaan). 2. Laporan kegiatan penyuluhan per penyuluh. 3. Rekapitulasi jumlah penyuluh aktif. 4. Validasi data melalui CAT PENAIS/Sistem pelaporan penyuluh.	Jumlah kelompok sasaran yang dibimbing / Jumlah penyuluh agama Islam	Kasi Bimas Islam

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam	Presentase sarana prasaranaa peribadatan agama islam yang memenuhi standar	1. Revitalisasi BKM 2. Pembinaan Masjid Percontohan 3. Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM Masjid	1. Instrumen checklist standar sarana prasarana masjid/musala. 2. Berita acara hasil verifikasi lapangan. 3. Data SIMAS (Sistem Informasi Masjid). 4. Laporan pembinaan dan revitalisasi.	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan : a = Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar b = Total sarana dan prasarana peribadatan yang diidentifikasi / diniai	Kasi Bimas Islam
		Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	1. Pendistribusian Kitab suci yang tersedia	1. Data distribusi kitab suci (BAST/berita acara serah terima). 2. Rekapitulasi laporan distribusi tahunan. 3. Dokumen permintaan dan penyaluran.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah kitab suci yang disediakan tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam
		Persentase peningkatan naskah & buku	Inventarisasi Buku dan Naskah Keagamaan	1. Data inventaris buku/naskah keagamaan. 2. Dokumen penetapan kelayakan edar. 3. Laporan pengadaan/pembinaan literasi keagamaan.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah buku/naskah keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah buku/naskah keagamaan yang layak edar pada tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam
		Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar	1. Workshop Pengelolaan Perpustakaan MAsjid/musolla 2. Pembinaan Validasi dan pendataan perpustakaan masjid/musola	1. Instrumen standar perpustakaan masjid. 2. Berita acara hasil validasi. 3. Data pembinaan perpustakaan. 4. Dokumentasi kegiatan workshop.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan b = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam
		Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	1. Verifikasi dan Validasi Data SIMAS 2. Kalibrasi arah kiblat	1. Data sertifikat arah kiblat. 2. Berita acara kalibrasi. 3. Data SIMAS terverifikasi. 4. Laporan teknis pengukuran arah kiblat.	$(a/b) \times 100\%$ a: Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat b: Total masjid/musholla yang terdata	Kasi Bimas Islam

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	1. Bimtek Hisab Rukyat 2. Rukyatul Hilal	1. Daftar hadir dan laporan pelaksanaan bimtek/ruk yatul hilal. 2. Dokumentasi kegiatan. 3. Rekapitulasi lembaga penerima manfaat. 4. Berita acara kegiatan.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a: Jumlah lembaga agama penerima manfaat pada tahun berjalan b: Jumlah lembaga agama penerima manfaat pada tahun sebelumnya	Kasi Bimas Islam
7	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf	Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam	1. Pendataan melalui aplikasi simzakata dan simwakaf 2. Pembekalan verifikator pendaftaran tanah wakaf 3. Pendampingan program kampung zakat	1. Data mustahik pada aplikasi SIMZAKAT/SIMWAKAF. 2. Data Regsosek (Kemensos/BPS) sebagai basis validasi. 3. Rekapitulasi data mustahik BAZNAS/LAZ. 4. Berita acara verifikasi dan validasi data.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah mustahik yang sesuai dengan data Regsosek b = Jumlah total mustahik yang tercatat oleh BAZNAS/LAZ	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
		Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	1. Program Ramadhan Ceria bersama BAZNAS dan LAZ 2. Pemberian sbantuan zakat dan wakaf kepada Mustahik/penerima bantuan	1. Nota kesepahaman (MoU)/Perjanjian kerja sama. 2. Laporan pelaksanaan kegiatan kolaboratif. 3. Dokumentasi kegiatan dan daftar penerima manfaat. 4. Rekapitulasi program kolaborasi tahunan.	$(a/b) \times 100\%$ a = jumlah kolaborasi program zakat tahun sebelumnya b = jumlah kolaborasi program zakat tahun berjalan	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
		Persentase harta benda wakaf yg dikelola dan dikembangkan produktif	Pendampingan program inkubasi wakaf produktif	1. Data aset wakaf terdaftar (AIW/APAIW). 2. Data aset wakaf produktif (laporan pengelolaan). 3. Laporan monitoring program inkubasi wakaf. 4. Data SIMWAKAF terverifikasi.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah harta benda wakaf yang dikelola secara produktif b = Total harta benda wakaf terdata	Penyelenggara Zakat dan Wakaf

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti	Assistensi Perlindungan Harta wakaf	1. Register kasus wakaf (mutasi/sengketa). 2. Surat rekomendasi/pendampingan hukum. 3. Berita acara penyelesaian kasus. 4. Laporan tindak lanjut advokasi.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah Kasus Wakaf yang Ditindaklanjuti b = Jumlah Kasus Wakaf yang Dilaporkan	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
8	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	1. Pengumpulan laporan keuangan dari BAZDA dan LAZ 2. Monitoring ke BAZDA dan LAZ	1. Daftar lembaga zakat terdaftar resmi. 2. Laporan keuangan tahunan BAZNAS/LAZ. 3. Berita acara monitoring dan pembinaan. 4. Checklist kepatuhan syariah dan tata kelola. 5. Laporan hasil evaluasi pengawasan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah Lembaga Zakat yang Diawasi = Jumlah Lembaga Zakat yang terdaftar	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
		Persentase Lembaga Wakaf yg diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	1. Pendampingan audit syariah kepada BAZDA dan LAZ 2. Pelatihan calon auditor syariah	1. Daftar lembaga wakaf terdaftar. 2. Laporan audit syariah/hasil pendampingan. 3. Berita acara pelaksanaan audit/pembinaan. 4. Instrumen evaluasi kepatuhan syariah dan tata kelola wakaf.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi b = Jumlah Lembaga Wakaf yang terdaftar	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
		Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	1. Pendampingan akreditasi lembaga zakat 2. Visitasi Kelembagaan Zakat dan wakaf	1. Register permohonan izin. 2. Berita acara hasil visitasi. 3. Surat rekomendasi/izin yang diterbitkan. 4. Laporan monitoring proses perizinan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah layanan izin yang diproses b = Jumlah permohonan yang masuk	Penyelenggara Zakat dan Wakaf
		Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	1. Validasi dan Verifikasi data SIWAK (Sistem Informai Wakaf) 2. Layanan Verifikasi tanah wakaf	1. Data permohonan AIW pada SIWAK. 2. Register penerbitan AIW. 3. Berita acara pemeriksaan tanah wakaf. 4. Dokumen AIW yang diterbitkan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah AIW yang Diterbitkan b = Jumlah permohonan yang masuk	Penyelenggara Zakat dan Wakaf

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
9	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yg profesional, inklusif, dan berdampak	Presentase penyuluh agama yg memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Pembinaan Penyuluh	1. Instrumen penilaian kinerja penyuluh terstandar. 2. Portofolio penyuluh (laporan harian, dokumentasi konten digital, sertifikat diklat). 3. Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja tahunan. 4. Data penyuluh aktif (database/SIMPEG/CAT terkait). 5. Berita acara hasil pembinaan dan evaluasi.	$(a / b) \times 100\%$ a = jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja berkategori baik b = jumlah total penyuluh agama	Kasubbag TU (Kristen dan Katolik)
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1. Pemetaan distribusi penyuluh agar lebih merata 2. Penguatan kapasitas penyuluh dalam membuat konten dakwah digital	1. Data kelompok sasaran binaan (daftar majelis/komunitas binaan). 2. Laporan kegiatan penyuluhan per penyuluh. 3. Rekapitulasi jumlah penyuluh aktif. 4. Peta distribusi wilayah binaan. 5. Validasi melalui sistem pelaporan penyuluhan (jika tersedia).	Jumlah kelompok sasaran yang dibimbing / Jumlah penyuluh agama	Kasubbag TU (Kristen dan Katolik) dan Kasi Bimas Islam
10	Meningkatnya kualitas jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yg diberangkatkan sesuai kuota	Validasi data jemaah berbasis siskohat terintegrasi	1. Data kuota jemaah lansia yang dialokasikan dari pusat (Dirjen PHU). 2. Data realisasi keberangkatan jemaah lansia pada aplikasi SISKOHAT. 3. Berita acara pelunasan dan penetapan jemaah lansia. 4. Rekapitulasi manifest keberangkatan kloter. 5. Laporan penyelenggaraan haji tahun berjalan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah Jemaah Lansia yang Diberangkatkan b = Kuota Jemaah Lansia yang dialokasikan	Bidang PHU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
11	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	1. Pemeliharaan berkala 2. Pemenuhan standar sarana melalui DIPA 3. Menyusun dan implementasi SOP dan audit mutu layanan secara berkala 4. Integrasi dengan siskohat dan layanan online untuk jamaah	1. Checklist standar sarana dan prasarana PLHUT. 2. Dokumen SOP pelayanan yang ditetapkan. 3. Berita acara audit mutu layanan. 4. Laporan monitoring dan evaluasi berkala. 5. Data integrasi layanan pada SISKOHAT. 6. Dokumentasi pemenuhan sarana melalui DIPA.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah PLHUT yang memenuhi standar b = Total jumlah PLHUT yang ada	Bidang PHU
		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu	1. Standarisasi SOP pelayanan yang sederhana dan transparan 2. Pemenuhan standar minimal fasilitas ramah jamaah 3. Penilaian kinerja berbasis kepuasan jamaah 4. Penguatan sistem digital terintegrasi dengan siskohat dan layanan online 5. Survei kepuasan jamaah secara periodik 6. Pusat pengaduan cepat tanggap (call center/online)	1. Instrumen survei kepuasan jamaah terstandar. 2. Rekapitulasi hasil survei (Indeks Kepuasan). 3. Laporan pengaduan dan tindak lanjut. 4. Dokumentasi pelayanan dan fasilitas PLHUT. 5. Laporan evaluasi mutu layanan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah responden yang menyatakan “puas” atau “sangat puas” terhadap layanan PLHUT b = Jumlah total responden survei kepuasan layanan PLHUT	Bidang PHU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
12	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase calon jemaah haji yg memperoleh sertifikat manasik haji	Penerbitan sertifikat calon jemaah haji yang sudah melaksanakan manasik	1. Daftar hadir kegiatan manasik haji tingkat kabupaten/kecamatan. 2. Data peserta manasik pada aplikasi SISKOHAT. 3. Register penerbitan sertifikat manasik haji. 4. Berita acara pelaksanaan manasik. 5. Rekapitulasi calon jemaah haji yang ditetapkan berangkat tahun berjalan.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah calon jemaah yang mengikuti manasik b = Jumlah calon jemaah yang akan diberangkatkan	Bidang PHU
13	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh	Persentase Lembaga penyelenggara haji khusus dan umroh yg terakreditasi (A): a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umroh	1. Evaluasi rutin layanan PIHK dan sanksi untuk pelanggaran 2. Program sertifikasi wajib bagi pembimbing dan pelatihan manajemen pelayanan 3. Sistem monitoring real-time berbasis digital (siskopatuh)	1. Data akreditasi resmi PIHK dan PPIU dari Dirjen PHU. 2. Data lembaga aktif pada sistem SISKOPATUH. 3. Berita acara hasil evaluasi dan pembinaan. 4. Laporan monitoring dan pengawasan berkala. 5. Dokumen penetapan hasil akreditasi. 6. Data sertifikasi pembimbing/manajemen dari sistem terkait.	$(a/b) \times 100\%$ a) $PIHK = (Jumlah\ PIHK\ akreditasi\ A \div Total\ PIHK\ aktif) \times 100\%$ b) $PPIU = (Jumlah\ PPIU\ akreditasi\ A \div Total\ PPIU\ aktif) \times 100\%$	Bidang PHU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
14	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah	Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Pendataan melalui Madrasah	1. Data kelulusan siswa pada aplikasi EMIS Madrasah. 2. Data nilai akhir/rapor pada sistem e-Rapor Madrasah. 3. Rekapitulasi hasil ujian madrasah. 4. Berita acara penetapan kelulusan dari satuan pendidikan. 5. Laporan rekapitulasi kelulusan tingkat kabupaten/kota.	$(a/b) \times 100\%$ a) Jumlah Siswa / Peserta Didik Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b) Jumlah Total Siswa / Peserta Didik yang Lulus pada Tahun Ajaran yang Sama	Kasi Pendidikan Madrasah
15	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 2. Mengoptimalkan pendampingan belajar di pesantren dan satuan pendidikan keagamaan 3. Menerapkan <i>early warning system</i> untuk mendeteksi siswa berisiko tidak lulus (indikator: nilai rendah, ketidakhadiran, masalah perilaku)	1. Data kelulusan santri pada EMIS Pesantren/PD Pontren. 2. Rekap nilai akhir/rapor pendidikan diniyah/pesantren. 3. Berita acara penetapan kelulusan oleh satuan pendidikan. 4. Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan pesantren. 5. Dokumen implementasi early warning system (rekap absensi, nilai, pembinaan perilaku).	$(a/b) \times 100\%$ a) Jumlah Santri / Siswa Lulus dengan Predikat <i>Jayyid Jiddan</i> b) Jumlah Total santri / Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
16	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	pembangunan gedung madrasah negeri sumber dana sbns, pendampingan program PHTC Pendidikan, monitoring dan evaluasi progres pembangunan gedung, monitoring progres rehabilitasi dan renovasi madrasah PHTC Pendidikan	1. Data Sarpras pada EMIS Madrasah. 2. Dokumen DIPA/SBSN dan kontrak pekerjaan. 3. Berita acara progres fisik (BAST/BASTP). 4. Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab. 5. Checklist pemenuhan SNP Sarpras.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP Sarpras b = Jumlah total madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang terdaftar	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Sosialisasi penggunaan aplikasi PBS (Profile belajar siswa) Untuk mendeteksi siswa Berkebutuhan Khusus	1. Data EMIS terkait layanan inklusif. 2. Dokumen SK penyelenggara pendidikan inklusif. 3. Laporan penggunaan PBS. 4. Rekap data siswa berkebutuhan khusus. 5. Laporan monitoring inklusivitas.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Jumlah total madrasah/satuan pendidikan keagamaan	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	Pendataan melalui data EMIS GTK	1. Data jumlah siswa pada EMIS tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 2. Rekapitulasi statistik siswa tingkat kabupaten. 3. Laporan validasi data EMIS.	$(a - b) / b \times 100\%$ a = Jumlah siswa tahun berjalan b = Jumlah siswa tahun lalu	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Pendataan melalui madrasah	1. Data ijazah/sertifikat PAUD siswa baru. 2. Rekap data peserta didik baru pada EMIS. 3. Berita acara verifikasi data PPDB.	$(a - b) / b \times 100\%$ a = Jumlah siswa kelas 1 MI/Ula/ sederajat yang memiliki ijazah PAUD b = Total seluruh siswa kelas 1 MI/Ula/ sederajat	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	1. Monitoring Madrasah Sehat dan UKS/M 2. Monitoring Sekolah Adiwiyata	1. SK Tim UKS/M atau program Madrasah Sehat. 2. Checklist standar layanan kesehatan sekolah. 3. Laporan monitoring UKS/M dan Adiwiyata. 4. Dokumentasi kegiatan kesehatan sekolah.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan b = Jumlah total satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
17	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas	Persentase pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	1. Rehabilitasi dan renovasi gedung pesantren dan satuan pendidikan keagamaan 2. Penyediaan sarana TIK di seluruh pesantren dan satuan pendidikan keagamaan 3. Penguatan layanan digital 4. Melakukan pelatihan SDM terkait pengelolaan sarana dan layanan publik	1. Data EMIS PD Pontren (sarpras). 2. Dokumen DIPA/Bantuan SBSN/BSI/Program bantuan sarpras. 3. Berita Acara Serah Terima (BAST). 4. Laporan monitoring dan evaluasi progres fisik. 5. Checklist pemenuhan SNP Sarpras.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pesantren/satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP Sarpras b = Jumlah total pesantren/satuan pendidikan keagamaan yang terdaftar	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Persentase pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1. Pelatihan guru tentang pendidikan inklusif 2. Monitoring kepatuhan pesantren terhadap regulasi 3. Penguatan moderasi beragama dan nilai inklusi di pesantren 4. Audit layanan pendidikan inklusif secara berkala	1. Data EMIS layanan inklusif. 2. SK penyelenggara pendidikan inklusif. 3. Laporan pelatihan guru inklusi. 4. Dokumen audit/monitoring layanan inklusif. 5. Data santri berkebutuhan khusus.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pesantren/satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Jumlah total pesantren/satuan pendidikan keagamaan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1. Pemetaan demografi calon siswa 2. Sosialisasi/promosi keunggulan satuan pendidikan kepada masyarakat 3. Peningkatan kualitas guru melalui diklat/sertifikasi 4. Pengembangan kurikulum kontekstual dan adaptif 5. Rehabilitasi/penambahan ruang kelas dan fasilitas. 6. Penyediaan sarana pendukung sesuai standar Pendidikan 7. Optimalisasi beasiswa dan program afirmasi 8. Kampanye inklusi dan moderasi beragama di lingkungan pendidikan	1. Data jumlah santri pada EMIS tahun berjalan & tahun sebelumnya. 2. Rekapitulasi statistik santri kabupaten. 3. Laporan validasi data EMIS PD Pontren.	$(a - b) / b \times 100\%$ a = Jumlah siswa tahun berjalan b = Jumlah siswa tahun lalu	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	1. Pengadaan sarana prasarana minimal UKS. 2. Standarisasi layanan kesehatan di sekolah/pesantren. 3. Pelatihan guru UKS dan kader kesehatan siswa. 4. Kemitraan sekolah dengan Puskesmas setempat. 5. Sosialisasi manfaat layanan kesehatan sekolah. 6. Penguatan peran komite sekolah/orang tua 7. Monitoring kesehatan siswa berkala. 8. Integrasi program UKS dengan program gizi dan kesehatan remaja 9. Penguatan MoU lintas sektor (Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes). 10. Integrasi data UKS dengan EMIS/Dapodik.	1. SK Tim UKS/Program Pesantren Sehat. 2. Checklist standar layanan kesehatan sekolah/pesantren. 3. Laporan monitoring UKS. 4. Dokumen MoU dengan Puskesmas. 5. Dokumentasi kegiatan kesehatan berkala.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan b = Jumlah total satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	1. Pemetaan kebutuhan sarpras sebelum revitalisasi. 2. Skala prioritas perbaikan sesuai urgensi dan keterjangkauan 3. Diversifikasi sumber pendanaan 4. Pelatihan pengelola dan tutor nonformal 5. Pendampingan teknis pasca revitalisasi 6. Sosialisasi manfaat pendidikan nonformal. 7. Melibatkan tokoh masyarakat dan ormas keagamaan. 8. Evaluasi capaian melalui indikator mutu layanan pendidikan.	1. Data EMIS satuan pendidikan nonformal. 2. Dokumen rencana revitalisasi dan skala prioritas. 3. BAST hasil revitalisasi. 4. Laporan pendampingan teknis. 5. Instrumen evaluasi mutu layanan pendidikan nonformal.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi b = Jumlah total satuan pendidikan nonformal yang terdata	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
18	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras	1. Diversifikasi sumber pembiayaan 2. Monitoring berbasis Sistem Informasi Sarpras Pesantren 3. Pemetaan kebutuhan sarpras berbasis EMIS/SIMPATIKA 4. Standardisasi perencanaan pembangunan sarpras 5. MengAlokasi anggaran pemeliharaan rutin 6. Sosialisasi dan pembinaan intensif standar sarpras 7. Penguatan sistem pengawasan berbasis digital (e-Monev)	1. Data EMIS PD Pontren (sarpras). 2. Sistem Informasi Sarpras Pesantren. 3. Checklist pemenuhan SNP Sarpras. 4. Laporan e-Monev dan monitoring lapangan. 5. Dokumen DIPA/BAST bantuan sarpras.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pesantren/satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP Sarpras b = Jumlah total pesantren/satuan pendidikan keagamaan yang terdaftar	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1. Pelatihan guru tentang pendidikan inklusif 2. Monitoring kepatuhan pesantren terhadap regulasi 3. Sosialisasi dan kampanye kesadaran publik 4. Penguatan moderasi beragama dan nilai inklusif 5. Audit layanan pendidikan inklusif secara berkala	1. Data EMIS layanan inklusif. 2. SK penyelenggara pendidikan inklusif. 3. Laporan pelatihan guru. 4. Instrumen audit layanan inklusif. 5. Data santri berkebutuhan khusus.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pesantren/satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Jumlah total pesantren/satuan pendidikan keagamaan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1. Pemetaan demografi calon siswa 2. Sosialisasi/promosi keunggulan satuan pendidikan kepada masyarakat 3. Peningkatan kualitas guru melalui diklat/sertifikasi 4. Pengembangan kurikulum kontekstual dan adaptif 5. Rehabilitasi/penambahan ruang kelas dan fasilitas. 6. Penyediaan sarana pendukung sesuai standar Pendidikan 7. Optimalisasi beasiswa dan program afirmasi 8. Kampanye inklusi dan moderasi beragama di lingkungan pendidikan	1. Data jumlah santri pada EMIS tahun berjalan & sebelumnya. 2. Rekap statistik santri kabupaten. 3. Berita acara validasi data EMIS.	$(a - b) / b \times 100\%$ a = Jumlah siswa tahun berjalan b = Jumlah siswa tahun lalu	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	1. Pendataan anak yang pernah mengikuti PAUD saat mendaftar. 2. Advokasi kebijakan wajib 1 tahun PAUD pra-Ula. 3. Penyusunan standar layanan PAUD nasional yang seragam 4. Integrasi data PAUD dengan EMIS dan Dapodik	1. Data ijazah/sertifikat PAUD siswa baru. 2. Rekap PPDB pada EMIS. 3. Berita acara verifikasi data peserta didik baru.	$(a - b) / b \times 100\%$ a = Jumlah siswa kelas 1 MI/Ula/ sederajat yang memiliki ijazah PAUD b = Total seluruh siswa kelas 1 MI/Ula/ sederajat	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	1. Pengadaan sarana prasarana minimal UKS. 2. Standarisasi layanan kesehatan di pesantren 3. Pelatihan guru UKS dan kader kesehatan siswa. 4. Kemitraan sekolah dengan Puskesmas setempat. 5. Sosialisasi manfaat layanan kesehatan sekolah. 6. Penguatan peran komite sekolah/orang tua 7. Penguatan MoU lintas sektor (Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes). 8. Integrasi data UKS dengan EMIS/Dapodik.	1. SK Tim UKS/Pesantren Sehat. 2. Checklist standar layanan kesehatan. 3. Laporan monitoring UKS. 4. Dokumen MoU Puskesmas. 5. Dokumentasi kegiatan kesehatan berkala.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan b = Jumlah total satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	1. Pemetaan kebutuhan sarpras sebelum revitalisasi. 2. Skala prioritas perbaikan sesuai urgensi dan keterjangkauan 3. Diversifikasi sumber pendanaan 4. Pelatihan pengelola dan tutor nonformal 5. Pendampingan teknis pasca revitalisasi 6. Sosialisasi manfaat pendidikan nonformal. 7. Melibatkan tokoh masyarakat dan ormas keagamaan. 8. Evaluasi capaian melalui indikator mutu layanan pendidikan.	1. Data EMIS satuan pendidikan nonformal. 2. Dokumen rencana revitalisasi & skala prioritas. 3. BAST hasil revitalisasi. 4. Laporan pendampingan teknis. 5. Instrumen evaluasi mutu layanan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi b = Jumlah total satuan pendidikan nonformal yang terdata	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	1. Peningkatan kompetensi guru. 2. Inovasi metode pembelajaran. 3. Penguatan kurikulum berbasis kompetensi. 4. Revitalisasi sarana pesantren. 5. Penyediaan dukungan teknologi pembelajaran. 6. Beasiswa dan bantuan sosial pendidikan. 7. Program parenting bagi orang tua. 8. Sosialisasi pentingnya pendidikan. 9. Penerapan sistem pemantauan perkembangan siswa. 10. Layanan kesehatan pesantren. 11. Konseling psikologis. 12. Kerjasama dengan Puskesmas/psikolog.	1. Data kohort siswa pada EMIS (awal masuk & kelulusan). 2. Rekap nilai dan status kelulusan. 3. Laporan monitoring perkembangan siswa. 4. Berita acara kelulusan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah siswa dalam kohort yang lulus tepat waktu b = Jumlah siswa dalam kohort saat pertama masuk jenjang pendidikan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
19	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan Madrasah	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	1. Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 2. Penyediaan perpustakaan digital & fisik yang memadai. 3. Pelatihan guru dengan metode literasi interaktif & berbasis konteks. 4. Penerapan pembelajaran numerasi berbasis masalah (problem-based learning). 5. Workshop metodologi pembelajaran aktif. 6. Pelatihan guru dengan metode literasi interaktif & berbasis konteks. 7. Integrasi numerasi dengan mata pelajaran lain. 8. Peningkatan diklat guru literasi & numerasi. 9. Kolaborasi sekolah–keluarga–komunitas 10. Penerapan early warning system hasil belajar.	1. Data resmi Asesmen Nasional (AN/AKM). 2. Rapor Pendidikan Madrasah. 3. Rekap hasil literasi & numerasi per madrasah. 4. Dokumen pelaksanaan GLS & pelatihan guru. 5. Laporan monitoring peningkatan mutu pembelajaran.	Persentase Literasi = (Jumlah Lembaga dengan predikat sedang / Jumlah Lembaga yang mengikuti AN) * 100% Persentase Numerasi = (Jumlah Lembaga dengan predikat sedang / Jumlah Lembaga yang mengikuti AN) * 100%	Kasi Pendidikan Madrasah
		Nilai keberagamaan siswa pada madrasah	Kegiatan Assesment Nasional dilihat dari rapot pendidikan	1. Instrumen asesmen keberagamaan siswa. 2. Rapor Pendidikan (dimensi karakter/iman-taqwa). 3. Rekap skor asesmen keberagamaan. 4. Berita acara pelaksanaan asesmen.	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa / Jumlah siswa yang di ukur	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	Pendataan siswa	1. Instrumen survei moderasi beragama. 2. Rekap nilai hasil pengukuran. 3. Dokumen kegiatan penguatan moderasi beragama.	a/b a = Total skor seluruh siswa b = Jumlah siswa yang dinilai	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah	1. Dokumen RKT (Rencana Kerja Tahunan). 2. Berita acara musyawarah/rapat komite. 3. Daftar hadir stakeholder. 4. Laporan pengesahan RKT.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan secara partisipatif b = Total satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Raport kokurikuler	1. Dokumen modul ajar/RPP berbasis karakter. 2. Raport kokurikuler. 3. Laporan supervisi pembelajaran. 4. Instrumen observasi integrasi karakter.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Total satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Madrasah
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	pendataan prestasi siswa	1. Rekap prestasi siswa tingkat kab/kota/prov/nasional. 2. Piagam/sertifikat penghargaan. 3. Laporan kegiatan ekstrakurikuler.	Penjumlahan seluruh prestasi yang diperoleh siswa dari kegiatan ekstrakurikuler dalam satu tahun ajaran / periode tertentu.	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	pendataan murid yang mengikuti ekskul pramuka	1. Instrumen penilaian karakter pra & pasca kegiatan. 2. Daftar hadir peserta pramuka. 3. Laporan pembina pramuka. 4. Rekap nilai karakter siswa.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a. Rerata Nilai Karakter Pasca Kegiatanb. Rerata Nilai Karakter Pra Kegiatan	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
20	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional	1. Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 2. Penyediaan perpustakaan digital & fisik yang memadai. 3. Pelatihan guru dengan metode literasi interaktif & berbasis konteks. 4. Penerapan pembelajaran numerasi berbasis masalah (problem-based learning). 5. Workshop metodologi pembelajaran aktif. 6. Pelatihan guru dengan metode literasi interaktif & berbasis konteks. 7. Integrasi numerasi dengan mata pelajaran lain. 8. Peningkatan diklat guru literasi & numerasi. 9. Kolaborasi sekolah–keluarga–komunitas 10. Penerapan early warning system hasil belajar.	1. Data resmi Asesmen Nasional (AN/AKM). 2. Rapor Pendidikan satuan pendidikan keagamaan/pesantren. 3. Rekap nilai literasi & numerasi per lembaga. 4. Dokumen pelaksanaan GLS & pelatihan guru. 5. Laporan monitoring peningkatan mutu pembelajaran.	Persentase Literasi = (Jumlah Lembaga dengan predikat sedang / Jumlah Lembaga yang mengikuti AN) * 100% Persentase Numerasi = (Jumlah Lembaga dengan predikat sedang / Jumlah Lembaga yang mengikuti AN) * 100%	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	1. Integrasi nilai-nilai kesalehan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal 2. Peningkatan bimbingan keagamaan yang berkelanjutan, seperti kegiatan keagamaan dan konsultasi agama 3. Membuat konten positif keagamaan yang inklusif, mudah diakses, dan menarik bagi lintas generasi	1. Instrumen asesmen keberagamaan santri (rubrik penilaian sikap & praktik ibadah). 2. Rekap nilai hasil asesmen internal pesantren. 3. Dokumen kurikulum integrasi nilai keagamaan. 4. Laporan kegiatan pembinaan keagamaan. 5. Berita acara pelaksanaan asesmen.	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa / Jumlah siswa yang di ukur	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	1. Integrasi moderasi beragama dalam kurikulum. 2. Penyusunan materi kontekstual & ramah anak. 3. Penyediaan modul & konten digital moderasi beragama. 4. Program penguatan karakter (P5 Profil Pelajar Pancasila). 5. Kegiatan dialog lintas iman berbasis praktik langsung. 6. Pengembangan instrumen asesmen moderasi beragama. 7. Monitoring & evaluasi berkala oleh sekolah Kemenag.	1. Instrumen survei moderasi beragama (terstandar Kemenag). 2. Rekap skor hasil pengukuran santri. 3. Dokumen modul/moderasi beragama. 4. Laporan kegiatan dialog lintas iman / penguatan karakter. 5. Laporan monitoring dan evaluasi berkala.	a / b $a = \text{Total skor seluruh siswa}$ $b = \text{Jumlah siswa yang dinilai}$	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
21	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	sosialisasi KBC	1. Dokumen kurikulum satuan pendidikan (KTSP/KOSP). 2. Dokumen hasil review/evaluasi kurikulum. 3. Berita acara rapat pengembangan kurikulum. 4. SK Tim Pengembang Kurikulum. 5. Instrumen checklist kesesuaian kurikulum berbasis KBC. 6. Laporan monitoring implementasi kurikulum.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah perangkat kurikulum yang telah dievaluasi dan dikembangkan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Agama Islam dan Kasi PD Pontren
		Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Pengumpulan materi digital dalam google drive	1. Repository resmi materi ajar digital (Drive/Platform LMS). 2. Daftar inventaris materi ajar digital per satuan pendidikan. 3. Log penggunaan/LMS analytics (jika tersedia). 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/Modul Ajar) yang memuat pemanfaatan materi digital. 5. Laporan supervisi pembelajaran berbasis digital.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar yang direncanakan/ditetapkan dalam kurikulum	Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Agama Islam dan Kasi PD Pontren
22	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Sosialisasi Akreditasi	1. Data resmi BAN-PDM/BAN-SM. 2. Sertifikat akreditasi satuan pendidikan. 3. Data EMIS PAUD/RA. 4. Rekap status akreditasi tingkat kabupaten.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah PAUD/RA yang terakreditasi minimal B b = Jumlah total PAUD/RA yang terdaftar di lingkungan Kementerian Agama	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase MI yang terakreditasi minimal B	Sosialisasi Akreditasi	1. Data BAN-SM. 2. Sertifikat akreditasi MI. 3. Data EMIS Madrasah. 4. Rekapitulasi status akreditasi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B b = Jumlah total satuan pendidikan sejenis yang terdaftar	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	Sosialisasi Akreditasi	1. Data BAN-SM. 2. Sertifikat akreditasi MTs. 3. Data EMIS Madrasah. 4. Rekapitulasi status akreditasi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah MTs/SMP TK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B b = Jumlah total satuan pendidikan sejenis yang terdaftar	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase MA yang terakreditasi minimal B	Sosialisasi Akreditasi	1. Data BAN-SM. 2. Sertifikat akreditasi MA. 3. Data EMIS Madrasah. 4. Rekapitulasi status akreditasi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B b = Jumlah total satuan pendidikan tersebut yang terdaftar	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Pendataan Madrasah yang telah menerapkan program pendidikan bilingual	1. SK penetapan program bilingual. 2. Dokumen kurikulum bilingual. 3. Jadwal pelaksanaan pembelajaran bilingual. 4. Laporan monitoring implementasi. 5. Data EMIS (program unggulan).	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah madrasah/satuan pendidikan yang menerapkan program bilingual b = Total madrasah/satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	pendataan olimpiade/ kompetisi/ pertandingan/ dll	1. Rekap peserta lomba tingkat kab/prov/nasional/internasional. 2. Surat tugas & daftar peserta. 3. Piagam/sertifikat keikutsertaan. 4. Laporan kegiatan kompetisi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional/internasional b = Total jumlah siswa	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Berdasarkan data akreditasi madrasah	1. Nilai komponen pengelolaan pada instrumen akreditasi BAN-SM. 2. Dokumen RKT partisipatif. 3. Berita acara rapat komite. 4. Laporan supervisi manajemen madrasah.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah madrasah yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah yang dinilai	Kasi Pendidikan Madrasah
23	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	1. Sosialisasi pentingnya mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal kepada peserta didik 2. Pendataan peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	1. Data EMIS Pendidikan Kesetaraan. 2. Daftar hadir & daftar kelulusan peserta. 3. Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL). 4. Rekap laporan penyelenggara kesetaraan. 5. Berita acara kelulusan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan secara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Program pembinaan khusus (bimbingan olimpiade, ekskul unggulan). 2. Pelatihan guru pembina lomba. 3. Integrasi pembinaan kompetisi dalam kurikulum ekstrakurikuler.	1. Surat tugas & daftar peserta lomba. 2. Sertifikat/piagam keikutsertaan. 3. Rekap laporan kegiatan lomba. 4. Database prestasi santri tingkat kab/prov/nasional/internasional.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional/internasional b = Total jumlah siswa	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan peningkatan mutu kepada satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan 2. Melakukan evaluasi penilaian melalui zoom apabila terkendala melakukan penilaian secara langsung.	1. Instrumen evaluasi mutu satuan pendidikan. 2. Berita acara visitasi/evaluasi (onsite/online). 3. Laporan hasil monitoring & evaluasi (Monev). 4. SK tim evaluasi. 5. Daftar satuan target evaluasi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang telah dinilai dan dievaluasi mutunya b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target evaluasi pada tahun berjalan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	1. Membuat modul pembinaan 2. Menyediakan pendampingan berkelanjutan bukan sekali datang 3. Melatih SDM satuan pendidikan agar memiliki kader internal yang dapat melanjutkan tata kelola 4. Penguatan koordinasi lintas instansi (kemenag, pemda, diknas) 5. Mengalokasikan anggaran 6. Melakukan survei kepuasan satuan pendidikan setelah pembinaan	1. SK/Surat tugas pendamping. 2. Modul pembinaan. 3. Laporan kegiatan pendampingan. 4. Daftar hadir pendampingan. 5. Kuesioner/survei kepuasan. 6. Dokumentasi kegiatan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang mendapat pendampingan b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target pendampingan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	1. Pelatihan dari Kemenag bekerja sama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan sumber daya yang ada 2. Membuat PKS dengan para pedagang atau distributor untuk menampung dan menyalurkan hasil sumber daya ekonomi	1. SK penetapan Pesantren Berdaya. 2. Dokumen program usaha/Business Plan. 3. PKS/MoU kemitraan usaha. 4. Laporan kegiatan usaha pesantren. 5. Dokumentasi & laporan perkembangan usaha.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren Berdaya b = Jumlah total pesantren pada tahun berjalan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	1. Pelatihan bahasa asing untuk guru-guru satuan pendidikan pesantren 2. Menerapkan kurikulum bahasa asing pada satuan pendidikan pesantren 3. Menerapkan penggunaan bahasa asing dalam proses belajar dan mengajar di satuan pendidikan pesantren	1. SK penetapan program bilingual. 2. Dokumen kurikulum bilingual. 3. Jadwal pembelajaran bilingual. 4. Laporan supervisi pembelajaran. 5. Data EMIS (program unggulan). 6. Dokumentasi praktik pembelajaran.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah madrasah/satuan pendidikan yang menerapkan program bilingual b = Total madrasah/satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
24	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	1. Melakukan PKS dengan lembaga independen yang dapat melaksanakan uji kompetensi sebelum siswa/santri lulus 2. Bekerjasama dengan lembaga profesi dalam pemberian pelatihan kompetensi sesuai dengan standar yang diakui	1. Data kelulusan resmi satuan pendidikan (EMIS/Dapodik pesantren). 2. Sertifikat uji kompetensi dari LSP/BNSP/lembaga independen. 3. Sertifikat pelatihan kompetensi terstandar. 4. MoU/PKS kerja sama dengan lembaga profesi atau lembaga pemerintah. 5. Surat pengakuan kesetaraan/rekognisi dari lembaga pemerintah atau pendidikan umum. 6. Rekapitulasi lulusan yang tersertifikasi/diakui. 7. Berita acara pelaksanaan uji kompetensi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah lulusan yang mendapatkan pengakuan kualifikasi (ijazah diakui, sertifikasi profesi, atau pengakuan lembaga pendidikan umum/pemerintah) b = Jumlah total lulusan pada tahun berjalan	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
25	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	hasil Rapot Pendidikan	1. Data resmi Asesmen Nasional (AN). 2. Rapor Pendidikan Madrasah. 3. Rekap skor literasi & numerasi per satuan. 4. Data partisipasi AN dari EMIS.	Persentase Literasi = (Jumlah Lembaga dengan predikat sedang / Jumlah Lembaga yang mengikuti AN) * 100% Persentase Numerasi = (Jumlah Lembaga dengan predikat sedang / Jumlah Lembaga yang mengikuti AN) * 100%	Kasi Pendidikan Madrasah
		Nilai keberagamaan siswa	hasil Rapot Pendidikan	1. Instrumen asesmen keberagamaan terstandar. 2. Rekap skor asesmen siswa. 3. Rapor Pendidikan (indikator karakter/iklim kebinekaan). 4. Daftar siswa yang diukur.	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa / Jumlah siswa yang diukur	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah	1. Instrumen penilaian moderasi beragama. 2. Rubrik observasi kegiatan ekstrakurikuler. 3. Daftar hadir & laporan kegiatan. 4. Rekap skor siswa.	a/b a = Total skor seluruh siswa b = Jumlah siswa yang dinilai	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Pengumpulan laporan RKT Madrasah tiap awal tahun pelajaran	1. Dokumen RKT ditandatangani kepala & komite. 2. Berita acara rapat partisipatif. 3. Daftar hadir pemangku kepentingan. 4. Laporan pengumpulan RKT awal tahun.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan secara partisipatif b = Total satuan pendidikan	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	1. sosialisasi kurikulum 2. Pendataan data madrasah	1. Dokumen kurikulum operasional madrasah (KOM). 2. Silabus/RPP yang memuat integrasi karakter. 3. Hasil supervisi akademik. 4. Laporan monitoring implementasi karakter.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Total satuan pendidikan	Kasi Penmad, Kasi PAI, Kasi PD Pontren dan Kasubbag TU (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha)
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	pendataan prestasi siswa	1. Piagam/sertifikat kejuaraan. 2. Rekap prestasi tingkat kab/prov/nasional/internasional. 3. Surat tugas peserta lomba. 4. Database prestasi madrasah.	Penjumlahan seluruh prestasi yang diperoleh siswa dari kegiatan ekstrakurikuler dalam satu tahun ajaran / periode tertentu.	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	pendataan ekskul	1. Instrumen penilaian karakter (pre-post). 2. Rubrik observasi pembina pramuka. 3. Daftar hadir kegiatan. 4. Rekap nilai pra dan pasca kegiatan.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a. Rerata Nilai Karakter Pasca Kegiatan b. Rerata Nilai Karakter Pra Kegiatan	Kasi Pendidikan Madrasah
		Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	sosialisasi kurikulum	1. Dokumen evaluasi kurikulum. 2. Berita acara review kurikulum. 3. SK tim pengembang kurikulum. 4. Dokumen revisi perangkat kurikulum. 5. Laporan monitoring pengembangan kurikulum.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah perangkat kurikulum yang telah dievaluasi dan dikembangkan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Kasi Pendidikan Madrasah
26	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Pendataan melalui aplikasi EMIS GTK	1. Data jumlah guru aktif (EMIS GTK/SIMPATIKA). 2. Data jumlah siswa aktif (EMIS). 3. Rekap distribusi guru per madrasah. 4. Standar SNP rasio guru-siswa.	(a / b) a = Jumlah siswa b = Jumlah guru	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Pendataan melalui aplikasi EMIS GTK	1. Data kualifikasi pendidikan (ijazah S1/D4). 2. Sertifikat kompetensi tenaga kependidikan. 3. Data EMIS GTK terverifikasi. 4. Rekap status kepegawaian.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 dan Sertifikasi Kompetensi b = Total Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Pendataan melalui aplikasi EMIS GTK	1. Rapor hasil AKG resmi. 2. Rekap nilai AKG per madrasah. 3. Data peserta AKG. 4. Berita acara pelaksanaan AKG.	$(a/b) \times 100$ a = Jumlah Guru Nilai AKG > 51 b = Jumlah Guru Peserta AKG	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Pendataan melalui aplikasi EMIS GTK	1. Rapor hasil AKK resmi. 2. Rekap nilai AKK. 3. Data kepala madrasah peserta AKK. 4. Dokumen hasil asesmen.	$(a/b) \times 100$ a = Jumlah kepala madrasah/sekolah yang memperoleh predikat minimal Terampil b = Jumlah total kepala madrasah/sekolah yang mengikuti AKK	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	1. Sosialisasi Moderasi beragama 2. Tes Moderasi beragama 3. Diklat moderasi beragama (online/offline)	1. Instrumen tes moderasi beragama. 2. Sertifikat diklat moderasi. 3. Rekap nilai asesmen moderasi. 4. Daftar GTK peserta asesmen.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah GTK yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal "Baik" b = Jumlah seluruh GTK yang mengikuti asesmen	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	1. Sosialisasi Moderasi beragama 2. Tes Moderasi beragama 3. Diklat moderasi beragama (online/offline)	1. Rapor hasil AKP resmi. 2. Rekap nilai AKP. 3. Data pengawas peserta AKP. 4. Berita acara pelaksanaan AKP.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai AKP di atas 51 b = Jumlah seluruh pengawas yang mengikuti AKP	Kasi Pendidikan Madrasah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang untuk Guru	1. SK kenaikan pangkat/jabatan fungsional. 2. Data SIMPEG/SIMPATIKA. 3. Sertifikat lulus uji kompetensi. 4. Rekap kenaikan jenjang periode berjalan.	$(a/b) \times 100$ a = Jumlah guru yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Jumlah total guru pada periode yang sama	Kasi Pendidikan Madrasah
		Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang untuk Pengawas	1. SK kenaikan jabatan pengawas. 2. Data SIMPEG. 3. Sertifikat uji kompetensi. 4. Rekap kenaikan jenjang periode berjalan.	$(a / b) \times 100\%$ a: Jumlah pengawas yang meningkat jenjang karir b: Total pengawas	Kasi Pendidikan Madrasah
27	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Penataan distribusi guru melalui sistem zonasi. 2. Pendataan jumlah siswa dan guru 3. Program sertifikasi & PPG. 4. Penguatan kompetensi melalui diklat berkelanjutan. 5. Supervisi akademik berjenjang.	1. Data jumlah guru aktif (EMIS/SIMPATIKA/Dapodik sesuai satuan pendidikan). 2. Data jumlah siswa aktif (EMIS/Dapodik). 3. Rekap distribusi guru per satuan pendidikan. 4. SK penempatan/mutasi guru. 5. Dokumen hasil supervisi akademik. 6. Data sertifikasi dan PPG guru. 7. Standar Rasio Guru–Siswa sesuai SNP.	$(a / b) a = \text{Jumlah siswab} = \text{Jumlah guru}$	Kasubbag TU (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kasi PAI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
28	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). 2. Konsolidasi kebutuhan dengan unit kerja sejak awal tahun. 3. Pemanfaatan aplikasi perencanaan terintegrasi (misal SAKTI). 4. Monitoring realisasi anggaran per triwulan. 5. Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) yang ketat. 6. Penegakan disiplin belanja berbasis output dan outcome.	1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada aplikasi SMART-DJPB. 2. Data realisasi anggaran dari OM-SPAN/SAKTI. 3. Data Deviasi Halaman III DIPA. 4. Data capaian output pada aplikasi SMART/SAKTI. 5. Laporan Monitoring & Evaluasi Triwulan. 6. Dokumen DIPA dan revisinya. 7. Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI).	Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan formula oleh Kementerian Keuangan dalam aplikasi SMART-DJPB, dengan bobot sebagai berikut (dapat berubah sesuai regulasi): Nilai Kinerja Anggaran = (x% Penyerapan Anggaran) + (y% Deviasi Halaman III DIPA) + (z% Capaian Output) Skor akhir berada dalam skala 0–100.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
29	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Membangun komitmen pimpinan untuk mendukung pelaksanaan SPIP di semua tingkatan 2. Mengintegrasikan SPIP dengan manajemen resiko dan penilaian kinerja	1. Hasil penilaian maturitas SPIP dari APIP/BPKP. 2. Dokumen manajemen risiko satker. 3. Laporan penilaian mandiri SPIP (Self Assessment). 4. SK Tim SPIP. 5. Laporan tindak lanjut rekomendasi audit.	$(a / b) * 100$ a = Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan SPIP b = Jumlah Satuan Kerja yang menjadi target penerapan SPIP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	1. Komitmen untuk segera menindaklanjuti laporan/ aduan yang masuk 2. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses tindaklanjut laporan/ aduan 3. Peningkatan kompetensi admin SP4N LAPOR	1. Data dashboard SP4N-LAPOR. 2. Rekap laporan masuk & status penyelesaian. 3. Berita acara penyelesaian pengaduan. 4. Laporan monitoring pengaduan triwulan.	$(a / b) * 100$ a = Jumlah Pengaduan yang Masuk b = Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1. Penguatan kepemimpinan & sosialisasi nilai integritas. 2. Monitoring rutin dan penghargaan bagi unit berprestasi. 3. Digitalisasi layanan dan proses bisnis. 4. Pengawasan gratifikasi dan korupsi melalui sistem pelaporan. 5. Audit dan evaluasi independen secara berkala.	1. Dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI. 2. SK Tim ZI. 3. Bukti implementasi 6 area perubahan RB. 4. Hasil evaluasi Inspektorat/KemenPANRB. 5. Laporan pengawasan gratifikasi & pengendalian korupsi.	$(a / b) * 100\%$ a = Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Zona Integritas b = Jumlah Satuan Kerja yang menjadi target penerapan Zona Integritas	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	1. Melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP 2. Meningkatkan kompetensi SDM yang menangani manajemen resiko	1. Dokumen Manajemen Risiko Satker. 2. Peta Risiko dan Rencana Mitigasi. 3. Hasil penilaian maturitas manajemen risiko oleh APIP. 4. Laporan monitoring risiko.	$(a / b) * 100\%$ a = Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan manajemen risiko b = Jumlah Satuan Kerja yang menjadi target penerapan manajemen risiko	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	1. Pelatihan teknis & pendampingan satker dalam penyusunan laporan kinerja. 2. Penguatan mekanisme validasi data dan audit internal. 3. Penjadwalan pelaporan bertahap dan disiplin waktu. 4. Monitoring & evaluasi yang konsisten dengan tindak lanjut perbaikan.	1. Dokumen LKjIP satker. 2. Hasil revidi APIP. 3. Bukti kesesuaian dengan KMA 94 Tahun 2021. 4. Berita acara evaluasi laporan kinerja.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang laporan kinerjanya sesuai standar (mengacu KMA 94 Tahun 2021) b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun LKjIP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Menyusun standar konten komunikasi yang sederhana dan informatif. 2. Menetapkan standar waktu tanggap aduan masyarakat. 3. Rapat koordinasi rutin dengan unit teknis.	1. Instrumen Survei IKM sesuai PermenPANRB. 2. Rekap hasil survei (manual/online). 3. Berita acara pengolahan hasil survei. 4. Laporan publikasi IKM. 5. Dokumen tindak lanjut hasil survei.	$(a / b) \times 100\%$ a = Skor total persepsi masyarakat dari seluruh unsur pelayanan b = Skor maksimal yang mungkin diperoleh berdasarkan jumlah responden dan bobot unsur	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
30	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Predikat Opini Laporan Keuangan	1. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan Bagan Akun Standar 2. Peningkatan pengetahuan SDM terhadap pelaksana anggaran melalui pelatihan baik secara offline maupun online 3. Penguatan terhadap Pengendalian internal di setiap satker 4. Memberikan akses penuh terhadap PIC pelaksana anggaran untuk bisa saling crosscheck terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan transaksi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 5. Memperkuat tata kelola dan proses pelaksanaan anggaran yang akuntabel dengan memaksimalkan sistem verifikasi dan evaluasi di setiap transaksi keuangan 6. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.	1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. 2. Dokumen Laporan Keuangan (LK Semester & Tahunan). 3. Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA/SAKTI. 4. Hasil revid APIP/Inspektorat. 5. Dokumen tindak lanjut temuan audit.	$(a / b) \times 100\% = \text{Jumlah entitas satuan kerja yang memperoleh opini WTPb} = \text{Jumlah seluruh entitas satuan kerja yang diperiksa}$	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja & kebutuhan riil. 2. Monitoring rutin serapan anggaran dengan sistem peringatan dini. 3. Optimalisasi e-procurement dan evaluasi kontrak. 4. Pelatihan SDM keuangan dan penyusunan SOP. 5. Penguatan pengendalian internal & review dokumen. 6. Integrasi aplikasi dan evaluasi berkala hasil monitoring.	1. Dashboard IKPA pada aplikasi OMSPAN/DJPb. 2. Laporan monitoring IKPA bulanan. 3. Data kontrak & realisasi pada SAKTI. 4. Dokumen revisi DIPA. 5. Laporan capaian output.	IKPA dihitung secara otomatis oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OMSPAN, dengan parameter dan bobot sebagai berikut: – Revisi DIPA (5%) – Penyerapan Anggaran (15%) – Deviasi Halaman III DIPA (5%) – Data Kontrak (10%) – Penyelesaian Tagihan (15%) – Pengelolaan UP dan TUP (5%) – Dispensasi SPM (5%) – Capaian Output (20%) – Nilai Kinerja Laporan Keuangan (20%)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Penegasan komitmen pimpinan & penguatan budaya tindak lanjut. 2. SDM proaktif dalam memahami regulasi TLHP 3. Tim koordinasi lintas unit dan integrasi sistem TLHP digital. 4. Memeriksa ulang bukti tindak lanjut untuk disampaikan ke auditor 5. Monitoring & evaluasi berkelanjutan dengan analisis akar masa	1. Daftar Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (BPK/APIP). 2. Aplikasi pemantauan TLHP. 3. Bukti setor/pemulihan kerugian negara. 4. Berita acara penyelesaian rekomendasi. 5. Laporan monitoring TLHP triwulan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (sesuai kriteria penyelesaian) b = Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	1. Penguatan SOP dan rekonsiliasi rutin. 2. Pelatihan dan penempatan SDM sesuai kompetensi. 3. Pengendalian internal melalui SPIP dan review atasan. 4. Timeline ketat dengan monitoring real-time. 5. Forum koordinasi dan sosialisasi regulasi. 6. Evaluasi berkelanjutan antar semester.	1. Dokumen LK Semester I & II. 2. Bukti pengiriman laporan tepat waktu (timestamp aplikasi). 3. Hasil reviu Inspektorat. 4. Berita acara rekonsiliasi internal. 5. Checklist kepatuhan standar akuntansi pemerintah (SAP).	$(a / b) \times 100\%$ = Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun laporan keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	1. Penyusunan jadwal & reminder sistem. 2. Peningkatan kapasitas SDM & kaderisasi. 3. Penguatan infrastruktur aplikasi e-BMN. 4. Validasi data aset sebelum input. 5. Monitoring real-time + reward & punishment.	1. Bukti input RKBMN pada aplikasi e-BMN/SIMAN. 2. Rekap ketepatan waktu penyampaian RKBMN. 3. Berita acara validasi data aset. 4. Laporan monitoring BMN tahunan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	1. Penguatan terhadap kemampuan dan pengetahuan terkait akun signifikan dan perlakuan transaksi keuangan 2. Meningkatkan pengendalian internal terutama penguatan fungsi Check and balance dalam setiap proses transaksi keuangan dalam rangka mitigasi resiko. 3. Memperkuat rancangan pengendalian yang lebih efektif dan memperkuat early warning system (deteksi dini) terhadap seluruh proses transaksi keuangan yang terindikasi menimbulkan masalah 4. Menentukan akun-akun kompleks yang sering menjadi temuan atau berpotensi menimbulkan masalah	1. Dokumen PIPK satker (identifikasi akun signifikan). 2. Kertas kerja pengujian pengendalian intern. 3. Hasil evaluasi PIPK oleh APIP. 4. Laporan self assessment PIPK. 5. Bukti implementasi check and balance transaksi.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b = Jumlah total satuan kerja	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
31	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	1. Penguatan ANJAB/ABK berbasis data riil. 2. Integrasi & validasi data kepegawaian. 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kepegawaian. 4. Forum koordinasi & helpdesk perencanaan SDM. 5. Adaptasi regulasi cepat & sosialisasi efektif. 6. Monitoring real-time + reward & punishment.	1. Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) yang disahkan. 2. Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK). 3. Dokumen Peta Jabatan & Formasi ASN. 4. Dokumen Rencana Kebutuhan ASN (RKASN) tahunan. 5. Data valid pada SIASN/SIMPEG. 6. Berita Acara Verifikasi & Validasi kebutuhan pegawai. 7. Bukti usulan formasi ke instansi pembina (BKN/KemenPANRB). 8. Laporan monitoring realisasi kebutuhan pegawai.	$(a/b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai & rencana pengadaan ASN yang sesuai kebutuhan b = Total jumlah satuan kerja	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	1. Perencanaan realistis berbasis data ASN. 2. Sosialisasi + insentif partisipasi ASN. 3. Kerja sama dengan lembaga asesmen terakreditasi. 4. Optimalisasi teknologi & integrasi data dengan SIMPEG. 5. Regulasi & anggaran asesmen yang konsisten. 6. Tindak lanjut hasil pemetaan untuk karir & pengembangan ASN.	1. Sertifikat hasil asesmen kompetensi dari lembaga terakreditasi (BKN/LAN/lembaga resmi). 2. Dokumen kerja sama/MoU dengan lembaga asesmen. 3. Daftar ASN peserta & lulus asesmen. 4. Data hasil asesmen yang terinput dalam SIASN/SIMPEG. 5. Dokumen peta talenta (talent mapping). 6. Rencana tindak lanjut pengembangan karier berbasis hasil asesmen. 7. Laporan pelaksanaan asesmen tahunan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi b = Jumlah total ASN aktif dalam periode yang sama	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
32	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	1. Menetapkan target realistis & prioritas kasus. 2. Meningkatkan kapasitas SDM hukum dan menggandeng pihak eksternal. 3. Memperkuat koordinasi dan sistem dokumentasi digital. 4. Memantau regulasi terbaru yang relevan. 5. Menyediakan anggaran khusus litigasi/non-litigasi. 6. Membuat sistem monitoring & evaluasi berkala.	1. Register perkara/kasus hukum (litigasi & non-litigasi). 2. Dokumen surat kuasa khusus (SKK). 3. Salinan putusan pengadilan/akta perdamaian/nota penyelesaian. 4. Laporan perkembangan perkara (legal progress report). 5. Berita acara penyelesaian kasus. 6. Dashboard monitoring perkara berbasis digital. 7. Dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil perkara.	$(a/b) \times 100\%$ a : Jumlah kasus yang terselesaikan b : Jumlah kasus yang ditangani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase rekomendasi izin orang asing	1. Menetapkan target berbasis tren permohonan & SPM yang jelas. 2. Meningkatkan kapasitas SDM verifikator izin. 3. Menyederhanakan SOP & memperkuat koordinasi antar instansi. 4. Sosialisasi regulasi terbaru secara cepat. 5. Optimalisasi layanan digital & anggaran khusus. 6. Membuat sistem monitoring dan audit kepatuhan izin.	1. Register permohonan rekomendasi izin orang asing. 2. Surat rekomendasi/pengantar yang diterbitkan. 3. Bukti verifikasi dokumen pemohon. 4. Checklist kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian. 5. SOP layanan rekomendasi izin. 6. Laporan monitoring waktu layanan (service level). 7. Rekapitulasi permohonan dan penerbitan surat pada aplikasi layanan digital.	$(a/b) \times 100\%$: Jumlah surat keterangan / pengantar yang diterbitkan untuk rekomendasi izin orang asing : Jumlah total permohonan rekomendasi izin orang asing	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
33	meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	1. Roadmap digitalisasi arsip prioritas. 2. Peningkatan kapasitas SDM arsiparis & tim TI 3. Penguatan infrastruktur server & cloud backup. 4. Penerapan standar keamanan data & SOP digitalisasi. 5. Koordinasi antar unit & perbaikan arsip fisik sebelum digitalisasi. 6. Alokasi anggaran khusus digitalisasi arsip. 7. Dashboard monitoring + standar metadata untuk akses mudah.	1. Roadmap digitalisasi arsip yang disahkan. 2. Daftar inventaris arsip (arsip statis & dinamis). 3. Register arsip yang telah dipindai dan diunggah dalam Sistem Informasi Kearsipan (SRIKANDI/aplikasi sejenis). 4. Bukti metadata arsip sesuai standar ANRI. 5. Log akses sistem digital (audit trail). 6. SOP digitalisasi dan keamanan informasi. 7. Laporan monitoring digitalisasi per triwulan.	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan tersedia dalam sistem digital yang dapat diakses b = Jumlah total arsip yang harus didigitalisasi dalam periode tertentu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	1. Menyusun roadmap berbasis data & sinkron dengan Renstra/RKBMN. 2. Meningkatkan kapasitas SDM perencana sarpras. 3. Membuat SOP implementasi roadmap & sistem monitoring digital. 4. Standarisasi teknologi → dorong smart office & green building. 5. Alokasi anggaran multiyears + opsi KPBU. 6. Audit teknis & evaluasi manfaat sarpras secara rutin.	1. Dokumen Roadmap Pengembangan Sarpras yang selaras Renstra & RKBMN. 2. Dokumen RKBMN dan DIPA terkait pengembangan sarpras. 3. Laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan sarpras. 4. Berita acara serah terima pekerjaan (BAST). 5. Laporan hasil audit teknis/inspektorat. 6. Data pada aplikasi SIMAN/e-BMN. 7. Dokumen evaluasi manfaat dan efisiensi sarpras (post implementation review).	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pengembangan sarpras yang sesuai roadmap b = Total kegiatan pengembangan sarpras dalam periode tertentu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
34	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	1. Roadmap & target PPID berbasis baseline. 2. Pelatihan + tim PPID permanen. 3. SOP & koordinasi diperkuat. 4. Portal PPID modern, terintegrasi & user-friendly. 5. Monitoring kepatuhan UU KIP & audit internal. 6. Anggaran khusus + komitmen pimpinan. 7. Evaluasi & dashboard monitoring progres kematangan.	1. Dokumen Roadmap Penguatan PPID. 2. SK Penetapan Tim PPID. 3. Dokumen SOP layanan informasi publik. 4. Daftar Informasi Publik (DIP) & Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). 5. Laporan hasil evaluasi keterbukaan informasi (internal/Komisi Informasi). 6. Hasil audit kepatuhan UU KIP. 7. Dashboard monitoring permohonan informasi. 8. Laporan realisasi anggaran PPID.	Nilai Akhir = (Skor Total Capaian / Skor Maksimum) × 100%	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	1. Membangun sistem monitoring media harian (media cetak, online, dan media sosial). 2. Menyusun SOP respon krisis komunikasi. 3. Menetapkan jalur persetujuan cepat untuk isu strategis. 4. Mengadakan media gathering secara berkala.	1. Laporan monitoring media harian (media cetak, online, sosial). 2. Rekap pemberitaan negatif terverifikasi. 3. Bukti klarifikasi/press release/respon resmi. 4. Dokumentasi publikasi counter narasi. 5. SOP manajemen krisis komunikasi. 6. Log waktu respon terhadap isu. 7. Laporan evaluasi komunikasi publik bulanan.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah pemberitaan negatif yang telah di <i>counter</i> b = Jumlah total pemberitaan negatif tentang Kemenag	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kankemenag	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon IV	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Pejabat Penerima Mandat Kinerja
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	1. Target berbasis data historis. 2. Kurasi konten & melibatkan pakar. 3. Tim kreatif digital + pelatihan. 4. Optimalisasi platform digital & studio produksi. 5. Distribusi multiplatform + versi offline. 6. Legal check & SOP editorial. 7. Evaluasi dampak konten secara berkala.	1. Kalender editorial tahunan. 2. Rekap jumlah konten terpublikasi (website, media sosial, kanal resmi). 3. Log unggahan & analytics platform (engagement, reach). 4. SOP editorial & legal check. 5. Dokumentasi produksi (naskah, video, desain). 6. Laporan evaluasi kinerja konten per triwulan.	$\{(a-b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun berjalan b = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun sebelumnya	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER,

